

Adaptasi Industri Perjalanan Wisata Bali Ditengah Anomali Kebijakan Menyambut Era Kenormalan Baru

Bagus Gowinda

Program Studi Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
idabagus2020@mail.ugm.ac.id

Janianton Damanik

Program Studi Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
antondmk@ugm.ac.id

Dyah Mutiarin

Program Studi Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
mutiarin@umy.ac.id

ABSTRAK

Menurut UNWTO (2020), selama masa pandemi terdapat penurunan yang cukup signifikan pada sektor – sektor pariwisata seperti, perjalanan dan perhotelan. Kondisi tersebut terjadi di seluruh negeri, tak terkecuali di pulau Bali sebagai destinasi wisata dunia. Selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, ketergantungan ekonomi Bali terhadap industri pariwisata begitu terasa. Dibarengi dengan kebijakan yang terus berubah seiring dengan perkembangan keilmuan terkait COVID-19 dan upaya penanganannya membuat industri pariwisata mau tidak mau harus ‘beradaptasi’ dengan lebih cepat. Artikel ini mencoba menjabarkan kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada industri perjalanan wisata khususnya di Bali. Kebijakan pemerintah yang coba dikaji adalah kebijakan yang terbit pada kuartal I dan II tahun 2020. Metode pengumpulan data dilakukan hanya dengan studi kepustakaan (literature review). Pembahasan disajikan bersifat deskriptif – kualitatif, serta ditinjau dengan kritis terhadap fenomena yang digambarkan dari data sekunder dan dokumentasi penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan topik yang sama. Hasil menemukan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia adalah mutlak untuk dijadikan referensi sektor industri perjalanan wisata untuk berbenah dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan penanganan COVID – 19 sekalipun kebijakan terkait selalu berubah sewaktu-waktu dengan dinamisnya.

KATA KUNCI: *Adaptasi Industri, Kebijakan Pariwisata, New Normal, Industri Perjalanan Wisata*

PENDAHULUAN

Selama pandemi Covid-19 ini berlangsung, ketergantungan ekonomi Bali terhadap industri pariwisata sangat jelas terlihat. Hal tersebut harus dipandang sebagai masalah yang harus dipertimbangkan untuk dicarikan solusi yang baik kedepannya. Kegiatan kepariwisataan bergantung

pada banyak hal, dua yang utama adalah faktor keamanan dan keselamatan. Terlepas dari manfaat ekonomi yang selama ini dihasilkan pariwisata, sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya sumber pendapatan daerah (S. Bong dkk, 2019). Harus adanya keseimbangan antara sumber PAD dalam neraca pendapatan Provinsi Bali selain dari pariwisata. Memang dalam jangka pendek, pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi yang cukup signifikan, akan tetapi dalam jangka panjang bisa jadi pariwisata akan menimbulkan kompleksitas permasalahan lain yang tidak dapat disangka-sangka, misalnya seperti yang terjadi saat ini. Akibat penyebaran virus covid-19 yang kian masif, berbagai konsekuensi muncul secara tidak langsung telah ‘meruntuhkan’ industri ini dengan membatasi pergerakan wisatawan antara lain, kebijakan pembatasan aktivitas penerbangan internasional, *travel warning* dari beberapa negara *demand side country*, pembatasan jam operasional sentra-sentra bisnis dan tidak konsistennya aturan serta kenyataan dilapangan pada awal-pandemi yang cenderung tidak jelas.

Kebijakan desentralisasi berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah memberikan legitimasi dan payung hukum kepada setiap daerah untuk merancang dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhannya. Memang kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi setiap daerah untuk membuat aturan dan mengelola sendiri urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Chotijah dkk, 2020). Namun tidak sinkronnya komunikasi publik pemerintah pusat seakan menjadi sulit diterjemahkan para pemimpin daerah dalam kebijakan daerahnya. Berkaca pada awal pandemi mulai merebak, sejumlah pernyataan



presiden dan para menterinya membingungkan publik dan menjadi olok-olok para pengkritiknya. Implementasi kebijakan maju mundur dan kurang solid antara pemerintah pusat dan daerah (Baiquni, 2020). Di kalangan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia termasuk yang kurang tanggap terhadap pandemi COVID-19 ini. Di tengah situasi anti ilmu pengetahuan, polarisasi paham keagamaan, dan korupsi melembaga; Pemerintah kurang jelas dan tegas memberi arah kebijakan dalam pencegahan merebaknya penularan penyakit ini (Mietzner, 2020). Kesan yang kurang solid itu menyiratkan pemerintahan manapun akan terlihat gagap dalam mengatasi Covid-19. Aksi yang merupakan bentuk implementasi dari kebijakan yang ada antar daerah mungkin saja berbeda satu sama lain, dimana hal tersebut tergantung pula pada pola penyebaran Covid-19 yang terjadi pada masing-masing daerah.

Kebijakan-kebijakan yang ganjil dan kontraproduktif, menjadi blunder dan anomali di tengah kesulitan daya beli masyarakat akibat pandemi ini (Yusrizal, 2020). Gejala kepentingan yang timbul mau tidak mau membuat industri perjalanan wisata harus siap, meskipun di tengah keterbatasan dan dinamisnya perubahan kebijakan. Mulai ditekannya sumber daya manusia sebagai pekerja, menipisnya kapital para pengusaha menjadi *handicap* yang bisa saja berlanjut dan berkepanjangan seiring dengan pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai (Afrilian, 2021). Tidak salah jika mayoritas pengusaha mengambil skema pesimistis pada periode ini.

Periodisasi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia

Berdasarkan model kelembagaan, pemerintah memiliki tugas utama sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua yang dibuat dan dilakukan oleh Pemerintah adalah kebijakan publik. Secara sederhana, kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintah (Parsons, 2011). Penyebaran virus corona jenis baru dengan nama ilmiah SARS-CoV-2 atau yang secara umum dikenal dengan virus COVID-19 sedang terjadi di Indonesia. Diawali dengan keputusan pemerintah pusat dengan mengevakuasi 250 orang WNI dari epicentrum Provinsi Hubei China untuk dikarantina di Pulau Natuna Indonesia pada kuartal I, 31 Januari 2020. Diikuti dengan ditemukannya kasus infeksi pertama di Indonesia yang menjangkiti dua orang WNI ibu dan anaknya pada 2 Maret 2020. Di lain sisi, setelah sekian bulan semenjak diidentifikasinya penyebaran virus COVID-19 pertama dunia yang terjadi di Kota Wuhan China pada Desember 2019, World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia baru

menetapkan virus ini sebagai pandemi global yang harus diwaspadai pada 11 Maret 2020. Ditetapkannya virus ini sebagai pandemi global merupakan akibat dari begitu cepatnya penyebaran yang telah merebak ke beberapa negara di berbagai belahan dunia. Mirisnya lagi karena telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Sinyal WHO tersebut menjadi 'alarm' bagi pemerintahan seluruh dunia, tidak terkecuali pemerintah Indonesia. Pemerintah pusat merespon dengan mengeluarkan Kepres No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang terbit pada 31 Maret 2020. Maka, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pola perilaku dan preferensi wisatawan dalam kegiatan berwisatanya pada masa pandemi COVID-19 ini setelah adanya kebijakan terkait pembatasan-pembatasan pada masa pandemi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para pengusaha di bidang pariwisata untuk bisa terus menjalankan bisnis dengan memahami pola perilaku dan preferensi wisatawan pada masa pandemi ini. Hal ini karena COVID-19 menyebabkan hal yang bersifat luar biasa dengan menyebutkan bahwa jumlah kasus kematian karena *Coronavirus* sudah meningkat dan meluas antar wilayah dan antar negara serta memiliki dampak pada kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dilanjutkan dengan keluarnya Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang terbit pada 13 April 2020. Kebijakan tersebut guna mendukung pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang tertuang dalam Kepres No. 9 Tahun 2020 hasil revisi Keppres No. 7 Tahun 2020 perihal sama yang telah terbit lebih dulu. Hasil revisi tersebut berintikan bahwa percepatan penanganan COVID-19 harus dilaksanakan melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pada kuartal II - 2020, periode Mei sampai dengan Agustus kebijakan yang berfokus pada penanganan penyebaran COVID-19 terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan kasus infeksi yang juga bergerak dinamis. Pada pertengahan bulan Juni 2020, Kementerian Perhubungan menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat

Produktif dan Aman *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), dan sehubungan diperlukannya penyesuaian aktivitas perjalanan orang dengan transportasi udara untuk pencegahan penyebaran Covid-19 menerbitkan SE No. 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara Dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Ini merupakan ‘angin segar’ bagi industri perjalanan wisata di Bali yang mana kebijakan ini sebagai bentuk pelonggaran untuk aktivitas perjalanan orang. Di mana sebelumnya sempat terjadi pembatasan perjalanan orang karena bertepatan dengan musim mudik lebaran. Pelonggaran ini juga menjadi awal dari kebijakan pemerintah yang membuka jalan ke arah kehidupan era kenormalan baru.

Era Kenormalan Baru (*New Normal*)

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya menangani kasus Covid-19 mulai dari himbauan agar masyarakat menerapkan *physical distancing*, *Work From Home* (WFH) bagi para pekerja formal, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para pelajar hingga diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik lebaran bagi beberapa daerah. Namun segala upaya pemerintah tersebut dinilai masih kurang efektif oleh kalangan praktisi kesehatan. Sementara itu dari kalangan ekonom mewanti-wanti pemerintah untuk tidak mengesampingkan ‘merosotnya’ ekonomi Indonesia. Mulai muncul perdebatan publik antara memilih menyelamatkan ekonomi atau mengutamakan kesehatan. Di Tengah tuntutan publik dan ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, membuat Presiden Joko Widodo mulai resah. Benar saja, dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terpukul berada pada kuartal I-2020 yaitu hanya sebesar 2,97%. Bahkan, seakan tidak pernah terbayangkan sebelumnya, COVID-19 mampu menghempaskan nilai tukar mata uang dari Rp 13.800/US\$ hingga hampir menyentuh angka Rp17.000/US\$ (Yusrizal, 2020). Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo membuat rencana untuk mengimplementasikan kebijakan *New Normal*. Kebijakan *New Normal* mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 mengenai Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 atau Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Adanya kebijakan *New Normal* tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat Indonesia mulai hidup damai dan berdampingan dengan COVID-19 dalam era tatanan kehidupan normal baru sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan

oleh pemerintah (kumparan.com, 2020).

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat kualitatif yakni penulis berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penulis sendiri (Suni & Badollahi, 2020). Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (I. Gunawan, 2013).

Metode pengumpulan data dilakukan hanya dengan studi kepustakaan (*literature review*). Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengembangkan analisis kritis terhadap fenomena sosial dan politik kebijakan selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Referensi data diseleksi sesuai kebutuhan penulis, berkaitan dengan kebijakan publik dan kepariwisataan yang mana merupakan topik artikel ini. Pendekatan teoritis didukung dengan *e-book*, jurnal serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada artikel yang memiliki topik maupun referensi yang dianggap berkaitan guna dijadikan sumber data primer. Dokumentasi kebijakan tertulis lembaga-lembaga otoritatif, portal berita konvensional, linimasa *online* digunakan sebagai sumber data sekunder. Data yang disajikan disini juga sebagian besar merupakan data kualitatif atau data yang berupa pernyataan-pernyataan yang menunjukkan sifat, ciri dan keadaan dari gejala atas peristiwa yang diteliti (Ahimsa-Putra, 2009).

Terakhir, teknik analisis data dalam penulisan artikel ini berangkat dari penjelasan Creswell (2014: 254-263) yang menekankan teknik pada pengorganisasian, pembacaan dan pembuatan catatan (*memoing*), pendeskripsian data, pengklarifikasian, serta penafsiran data menjadi kode dan tema. Analisis data sendiri dibantu dengan *software* pengolah data kualitatif, *VosViewer* dan *QSR Nvivo 14*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adaptasi Industri Perjalanan Wisata di Bali

Perubahan yang tengah berlangsung sebagai dampak dan respons atas mewabahnya COVID-19 menghadirkan teka-teki yang tidak mudah untuk dijawab, terutama terkait dengan: 1) kompatibilitas antara nilai dan tatanan yang selama ini dianggap mapan dengan kebutuhan untuk

merespons krisis akibat COVID-19, maupun setelah nantinya wabah ini berlalu; 2) bentuk-bentuk perubahan atau normalitas baru yang tengah berlangsung baik di level personal, sosial, maupun organisasional; dan 3) derajat kedalaman dan sifat perubahan, apakah bersifat permanen / berkelanjutan atau sementara / jangka pendek (Mas'udi & Winanti, 2020). Pertanyaan penting yang bisa diajukan adalah pada poin terakhir yakni apakah perubahan yang digambarkan saat ini akan bersifat permanen atau hanya sementara.

Dalam situasi pandemi COVID-19 yang melanda berbagai belahan dunia saat ini, sepertinya sulit untuk tidak mengatakan ada industri yang tidak terdampak. Menginjak bulan ke delapan dampak pandemi ini tentunya paling dirasakan industri pariwisata Bali, dibanding industri pariwisata daerah lain. Dalam kehidupan bisnis industri pariwisata Bali pada masa pandemi COVID-19, risiko terbesar tentu saja adalah kebangkrutan. Terbukti, dampak pandemic mengakibatkan lumpuhnya pariwisata Bali yang menyebabkan lumpuhnya ekonomi Bali secara umum dimana di triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai -10,98%. Pada kondisi normal kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali yaitu mencapai 53% terutama yang berkaitan dengan UMKM dan Koperasi serta menampung tenaga kerja sekitar 1,1 juta orang. Selain itu juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 2.667 orang dan yang sudah dirumahkan sebanyak 73.631 orang (Baliprov, 2020). Disisi lain, sudah hampir Rp. 900 miliar rupiah dana yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Bali untuk menanggulangi wabah virus SARS-CoV-2 ini beserta permasalahan sosial yang mengikutinya.

Pada awal-awal pandemi pada Maret 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengkampanyekan dan mengajak seluruh masyarakat untuk berlibur ke destinasi yang berada di Indonesia. Hal tersebut dipandang sebagai langkah untuk mengurangi dampak dari wabah virus corona bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah juga berusaha menyiapkan beberapa insentif demi menarik wisatawan. Misalnya adalah memberikan diskon tiket pesawat hingga 50%. Namun, strategi tersebut ternyata kurang begitu ampuh dalam meningkatkan animo masyarakat untuk bepergian dengan tujuan wisata setelah beberapa hari sebelumnya dihebohkan dengan kasus infeksi pertama COVID-19 yang melanda Indonesia.

Namun saat ini, Kemenparekraf telah menetapkan Langkah - langkah strategis bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa tanggap darurat pandemi

COVID-19. Pemerintah membagi tiga tahapan dalam penanganan COVID-19. Yaitu masa tanggap darurat, pemulihan (*recovery*), dan normalisasi. Di masa tanggap darurat telah digulirkan diantaranya enam program sesuai dengan kewenangan Kemenparekraf dalam upaya mitigasi terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Program tersebut meliputi penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi, konsumsi bagi tenaga medis dan tenaga pendukung RS Rujukan penanganan COVID-19 sesuai rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selanjutnya, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, Kemenparekraf secara intensif memberikan usulan berbagai program yang dapat memberi keringanan bagi industri dan pekerja pariwisata serta ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19. Kemenparekraf telah mengusulkan lapangan usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masuk dalam Permenkeu 23/PMK.03/2020. Subsektor yang masuk dalam lapangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif akan dapat memanfaatkan insentif berupa Subsidi PPh 21, Pembebasan PPh 22 Impor, dan pengurangan PPh sebesar 30 persen. Menparekraf berharap pelaku UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi bisa memaksimalkan kebijakan tersebut saat perluasan Permenkeu 23/PMK.03/2020 telah disahkan oleh Kemenkeu (Baliekbis, 2020).

Berbagai acara guna menggairahkan kembali pariwisata Bali telah diinisiasi pemerintah, diantaranya adalah kampanye wisata *'We Love Bali'* yang menjadi ajang mengimplementasikan protokol CHSE guna menggeliatkan kembali pariwisata dan ekonomi. Pembukaan aktivitas pariwisata di Bali untuk wisatawan nusantara (domestik) pada 31 Juli 2020 yang lalu mengakibatkan jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Bali melalui pintu Bandara I Gusti Ngurah Rai telah meningkat mencapai lebih dari 100%. Sampai tanggal 20 September 2020, jumlah wisatawan nusantara yang melalui pintu Bandara I Gusti Ngurah Rai mencapai sekitar 2500 - 5000 orang per-hari. Berikutnya, acara yang baru saja diselenggarakan 20 Oktober kemarin yang juga bertempat di Desa Adat Penglipuran adalah *'Simakrama Kepariwisata'* antar *stakeholder* pariwisata Bali. *Simakrama* ini diselenggarakan untuk menjawab keraguan dari pelaku pariwisata terhadap segala kebijakan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan pariwisata yang telah diambil oleh pemerintah serta untuk penyamaan pandangan, gerak dan langkah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam rangka pemulihan pariwisata Bali (Baliprov, 2020).

Pada akhirnya kuartal II, perjalanan wisata dalam negeri mulai dibuka. Strategi ini dipandang merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh industri perjalanan wisata Bali. Ketika masih diberlakukannya *travel warning* internasional, tidak banyak pilihan yang bisa dieksekusi dengan efektif. Banyak negara dalam sektor pariwisatanya memutuskan untuk bergerak mempromosikan perjalanan domestik dan melayani pengunjung dari negara mereka sendiri agar pariwisata tidak terus mengalami keterpurukan (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2020). Dikarenakan adanya perubahan target pasar pada masa pandemi ini, target pasar sektor pariwisata yang semula adalah wisatawan mancanegara berubah menjadi wisatawan domestik untuk tetap menghidupkan bisnis dan usaha pariwisata bagi masyarakat.

Berbagai protokol *New Normal* pariwisata telah dikeluarkan yang diharapkan dapat menjadi acuan industri perjalanan wisata. WTTC (*World Travel and Tourism Council*) mengemukakan protokol mulai untuk *airport, airlines, hotel, shopping industry, tour operators*, dan MICE secara terperinci dan komprehensif, sebagai berikut (Asmoro, 2020): 1. Aspek Kesiapan Operasional dan Staff; 2. Aspek Memberikan Rasa Aman; 3. Aspek Membangun Ulang Kepercayaan & Kepercayaan Diri; dan 4. Aspek Implementasi Kebijakan dengan berbagai poin-poin penting yang menyertainya.

KESIMPULAN

Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap industri perjalanan wisata Bali sungguh terasa, menjadi yang terburuk setelah tragedi Bom Bali 1 dan 2. Aktivitas penerbangan yang juga berimplikasi pada keluar masuknya wisatawan ke Bali sempat dibatasi, regulasinya diperketat mengacu pada ketentuan protokol Kesehatan dari pemerintah. Praktis karena penerbangan internasional masih ditutup sampai akhir kuartal II 2020, akibatnya Bali tidak menerima kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara itu, kebijakan untuk membuka kembali penerbangan domestik memunculkan harapan baru bagi industri perjalanan wisata Bali.

Sisi positif dengan adanya larangan perjalanan wisata/aktivitas penerbangan internasional inilah berangsur-angsur terjadi kenaikan permintaan pada sektor perjalanan wisata domestik. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, mengungkapkan bahwa akan terjadi perubahan pada orientasi segmentasi pasar di Indonesia, yaitu bergeser dari kebutuhan wisatawan mancanegara menjadi wisatawan domestik (Kemenpar, 2020).

Adanya konsep-konsep baru terkait CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability*) sangat perlu dilaksanakan oleh sektor industri perjalanan wisata, dan inilah yang dianggap sebagai awal mula membangun kembali kepercayaan dunia pariwisata internasional.

Untuk memahami lebih lanjut fenomena adaptasi industri pariwisata yang terdampak, perlu diadakan penelitian lebih dengan menggunakan metode lain dan disarankan untuk melakukan *indepth-interview* kepada pelaku industri pariwisata yang secara langsung telah merasakan dampak dari COVID-19 ini terhadap usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilian, P. (2021). Analisis peran Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi dalam meningkatkan Fasilitas pada Objek Wisata Taman Margasatwa Kinantan. *Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, 3(1), 44–48. <https://doi.org/10.33649/pusaka.v3i1.30>
- Asad, A. 2020. *Covid-19 Impact and Survival Strategy in Business Tourism Market: the example of UEA MICE industry*. UAE: University of Sharjah.
- Agustino, L. 2020. *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*. Jurnal Borneo Administrator. Banten: Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- Ahimsa-putra, HS. 2009. *Bahasa, Sastra, dan Kearifan Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Aref, F. 2011. *Sense of Community and Participation for Tourism Development*. *Life Science Journal* 8 (1).
- Baiquni, Muhammad. 2020. *Menata Ulang Kepariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan Merespons Pandemi COVID-19*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Baliprov.go.id. 2020. "Peraturan Gubernur Bali No. 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali". (diunduh 28 November 2020)
- BBC.com. 2020. "Virus Corona: 250 WNI dievakuasi dari Hubei, pangkalan militer di Natuna jadi tempat isolasi". Virus corona: 250 WNI dievakuasi dari Hubei, pangkalan militer di Natuna jadi 'tempat isolasi' - BBC News Indonesia (diunduh 14 Desember 2020)
- bpk.go.id. 2020. "Kepres No. 11 Tahun 2020". KEPPRES No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [JDIH BPK RI] (diunduh 14 Desember 2020)
- Chotijah, dkk. 2020. Strategi Branding Pelaku Usaha

- Pariwisata di Masa Pandemi. *Business Innovation & Entrepreneurship Journal*. Garut: Universitas Garut.
- Creswell, J.W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Edisi 3)*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Covid.go.id. 2020. "Regulasi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020". Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan sebagai Bencana Nasional - Regulasi | Satgas Penanganan COVID-19 (diunduh 15 Desember 2020)
- De Kadt, E. 1979. *Tourism-Passport to Development?* New York: Oxford University Press.
- Katadata.co.id. 2020. "Simalakama Mitigasi Covid-19, Kesehatan atau Ekonomi". Simalakama Mitigasi Covid-19, Kesehatan atau Ekonomi? - Analisis Data Katadata (diunduh 8 Desember 2020)
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020. Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Pemerintah Penambahan Modal Kerja dan atau Investasi Tetap Untuk Meningkatkan Kapasitas Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020. Jakarta. Deputi Bidang Industri dan Investasi. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kompas.com. 2020. "WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi Global". WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global Halaman all - Kompas.com (diunduh 26 November 2020).
- Kumparan.com. 2020. "Kebijakan New Normal Diterapkan Karena Pemerintah 'Galau'?". Kebijakan New Normal Diterapkan karena Pemerintah 'Galau'? - kumparan.com (diunduh 8 Desember 2020)
- Indonesia.go.id. 2020. "Negara Hadir - Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik". Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik | Indonesia.go.id (diunduh 14 Desember 2020)
- Dephub.go.id. 2020. "Operasional Transportasi Udara Dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". SE_13 TAHUN 2020.pdf (dephub.go.id) (diunduh 25 Desember 2020)
- Detik.com. 2020. "Curhat Sri Mulyani, Dilema pilih Kesehatan atau Ekonomi". Curhat Sri Mulyani, Dilema Pilih Kesehatan atau Ekonomi (detik.com) (diunduh 28 Desember 2020)
- Mas'udi, Wawan dan Winanti, P. S. (eds). 2020. *New Normal - Perubahan Sosial dan Ekonomi Akibat Covid-19*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mietzner, Marcus. 2020. "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response". *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 00(0) 1-23. SAGE <https://journals.sagepub. c>
- Mustika, Syanti. 2020. Persiapan Kemenparekraf Sambut Wisatawan di New Normal. Artikel ini diakses melalui <https://travel.detik.com/>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali.
- S. Bong, dkk. 2019. *Manajemen Resiko, Krisis dan Bencana untuk Industri Pariwisata yang Berkelanjutan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Syarifuddin, dkk. 2020. *Covid-19 & Disrupsi - Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Suni, M., & Badollahi, M. Z. (2020). Strategi Diversifikasi Atraksi Budaya Dalam Mendukung Pengembangan Wisata Desa Wakatobi. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 25. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.1.25-33.2020>
- UNWTO. 2020. *Tourism and Covid-19 Unprecedented Economic Impacts*. (diakses <https://www.unwto.org/> 22 Desember 2020)
- Yusrizal, 2020. Blunder dan Anomali Kebijakan Presiden Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Lampung: Pusaka Media. Universitas Lampung.